



TECH FOR  
GOOD  
INSTITUTE



Laporan

Evolusi

Tata Kelola Teknologi Digital  
di 6 Negara Asia Tenggara

Maret, 2025



# Mengenai Studi Ini

The Evolution of Tech Governance in Southeast Asia-6 adalah edisi kedua dari seri Tech for Good Institute dalam upaya membentuk ekosistem digital di Asia Tenggara. Sementara edisi 2023, berfokus pada identifikasi mengenai “siapakah” regulator utama dalam lingkup ekonomi digital, edisi kedua ini disusun berdasarkan pemahaman tersebut dengan mengeksplorasi siapakah pemain utama, “bagaimana” pemerintah melakukan pendekatan terhadap tata kelola teknologi, dan “apa” area kebijakan yang menjadi hal prioritas di tahun 2024, serta menawarkan wawasan tentang lanskap regulasi yang terus berkembang di Asia Tenggara.

Laporan ini, utamanya berkontribusi dengan cakupan pembahasannya yang diperluas, tercermin dari judul laporan ini. Sementara regulasi berkaitan dengan kebijakan dan undang-undang tertentu, tata kelola mencakup struktur, proses, serta pertimbangan administratif yang terlibat dalam pelaksanaan wewenang pemerintah sebagai regulator. Dengan melampaui pemahaman mengenai siapakah regulator terbaru dan apa saja peraturan yang disahkan, demi menuju pemahaman tata kelola yang lebih holistik, kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan mengenai arah serta pendekatan terhadap ekosistem digital di kawasan Asia Tenggara.

Laporan ini menyoroti enam negara ekonomi digital utama di kawasan Asia Tenggara, yaitu: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam (secara kolektif disebut sebagai SEA-6). Seiring dengan pesatnya transformasi digital, berbagai pemerintahan negara di kawasan ini mengadopsi kebijakan dan kerangka kerja demi menanggapi peluang serta tantangan yang dihadirkan oleh teknologi baru secara efektif.

Tentunya laporan ini dibentuk berkat hasil kolaborasi dengan institusi-institusi yang telah berkontribusi dari masing-masing negara, laporan ini memberikan wawasan mendalam tentang lanskap dinamis tata kelola teknologi digital di SEA-6. Kami menyadari bahwa kemajuan teknologi yang cepat dan perbedaan di setiap negara, membuat aturan ekonomi digital akan terus berubah dan berkembang. Kami berharap ringkasan perkembangan tahun 2024 ini dapat berguna bagi pembuat kebijakan, peneliti, serta pelaku industri untuk memahami perubahan peraturan di Asia Tenggara.

Laporan ini bertujuan menjadi titik awal bagi perbincangan yang bermakna. Asia Tenggara menghadirkan peluang berharga untuk saling belajar dari pengalaman satu sama lain dalam pengelolaan teknologi digital. Laporan ini berharap dapat menjadi sumber daya bersama yang menampilkan perkembangan tata kelola penting di kawasan Asia Tenggara ini, serta mendorong diskusi dan kerja sama untuk membangun aturan yang lebih baik dan maju. Dengan mengantisipasi penyelesaian negosiasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada akhir tahun ini, laporan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi area konvergensi umum di mana kerja sama nyata dalam interoperabilitas regional dapat ditingkatkan.

## Penghargaan

Tech for Good Institute mengucapkan terima kasih kepada para mitra kami atas masukan yang sangat berharga untuk laporan ini:

-  **Anont Tanaset**  
Office of National Higher Education Science Research and  
Innovation Policy Council, Thailand
-  **Ariane Yasmin**  
TIA Editors, Malaysia
-  **Farlina Said**  
Institute of Strategic and International Studies, Malaysia
-  **Hafiz Noer**  
Center for Digital Society, Indonesia
-  **Irfan Dwi Putra**  
Center for Digital Society, Indonesia
-  **Lim How Khang**  
Singapore Management University, Singapore
-  **Nguyen Minh Thao**  
Central Institute for Economic Management, Vietnam
-  **Oliver Reyes**  
University of the Philippines Law Center, Philippines

Tech for Good Institute juga berterima kasih kepada Grab yang selalu mendukung misi TFGI untuk mendorong dalam memanfaatkan janji teknologi dan ekonomi digital menjadi kekuatan untuk pertumbuhan yang inklusif, setara, dan berkelanjutan di Asia Tenggara. Para penyandang dana tidak menentukan hasil temuan, wawasan, maupun rekomendasi penelitian ini.

## Penafian

Informasi dalam makalah ini disediakan atas dasar “apa adanya”. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi untuk investasi di industri apa pun. Dokumen ini dibuat oleh Tech for Good Institute dan telah disiapkan semata-mata untuk tujuan informasi dalam jangka waktu terbatas untuk memberikan perspektif mengenai kawasan ini. Institut dan afiliasinya, atau pihak ketiga yang terlibat, tidak memberikan pernyataan atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratan atau kelengkapan informasi dalam dokumen ini, dan tidak ada tanggung jawab atau kewajiban apa pun yang diterima oleh siapa pun dari Institut, afiliasinya, serta pejabat, karyawan, atau agennya masing-masing.

Hak Cipta © 2025 oleh Tech for Good Institute. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Izin diberikan untuk mereproduksi file ini atau isinya, dengan menyebutkan Tech for Good Institute.

## Mengenai Tech for Good Institute

Tech for Good Institute (TFGI) adalah sebuah organisasi nirlaba yang berupaya mengedepankan janji teknologi dan ekonomi digital untuk pertumbuhan yang inklusif, setara, dan berkelanjutan di Asia Tenggara.

Asia Tenggara memiliki penduduk dua kali lebih banyak daripada Amerika Serikat serta demografi yang kuat, hal ini memungkinkan ekonomi digital untuk tumbuh dengan pesat. Pada saat yang sama, perkembangan di Asia Tenggara memiliki sifat yang unik, hal ini dikarenakan pengaruh budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang beragam. Tech for Good Institute memiliki fungsi sebagai platform untuk penelitian, diskusi dan kolaborasi yang berfokus pada Asia Tenggara, sambil tetap terhubung dengan seluruh dunia. Pekerjaan kami berfokus pada sejumlah topik yang merupakan titik temu antara teknologi digital, masyarakat, serta perekonomian, dan secara intrinsik berhubungan dengan perkembangan kawasan Asia Tenggara. Kami berusaha memahami serta memberikan masukan untuk kebijakan secara teliti, seimbang, dan terarah melalui riset, pendekatan yang baik, dan rekomendasi berdasarkan data.

TFGI didirikan oleh Grab untuk memajukan visi Asia Tenggara yang berkembang dan inovatif bagi semua. Kami menyambut baik peluang kemitraan dan dukungan, baik secara finansial maupun dalam bentuk barang atau lainnya, dari organisasi dan individu yang berkomitmen untuk memperkuat inovasi dan kemajuan digital demi pertumbuhan yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Informasi lebih lanjut mengenai TFGI dapat diakses di [www.techforgoodinstitute.org](http://www.techforgoodinstitute.org).

# Ringkasan Eksekutif

Seiring dengan bertumbuhnya ekonomi digital di Asia Tenggara yang terus mendorong kemajuan ekonomi, tren kebijakan dan tata kelola, secara bersamaan, telah bergeser dari ekspansi yang cepat menjadi pembangunan yang bertanggung jawab. Di tahun 2024, para pemerintah negara di wilayah ini memusatkan perhatian pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan terpercaya dengan ekosistem digital, seiring dengan pesatnya inovasi dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Pada tahap awal perkembangan ekonomi digital Asia Tenggara, pola pikir "bergerak cepat dan mendobrak segalanya" lebih dominan, di mana mengutamakan kecepatan serta inovasi. Pandemi ini semakin mempercepat skala dan adopsi secara pesat. Namun demikian, seiring dengan semakin tertanamnya teknologi digital di lingkungan masyarakat, risiko pun semakin meningkat. Maka dari itu, Pemerintah mengadopsi pendekatan yang lebih terukur untuk mengurangi konsekuensi yang tidak diinginkan, termasuk disinformasi, ancaman siber, dan gangguan terhadap tenaga kerja. Selain itu, kejelasan peraturan dan interoperabilitas sangatlah penting untuk menarik investasi dan mengurangi biaya operasional seiring dengan pertumbuhan perusahaan.

Oleh karena itu, tata kelola ekosistem digital diharapkan tetap menjadi prioritas kebijakan utama bagi pemerintah. Di Asia Tenggara, hal ini terjadi dalam dua cara utama, yaitu: menyeimbangkan promosi ekonomi digital untuk memungkinkan teknologi digital yang sedang berkembang, sekaligus memajukan dan melindungi masyarakat digital. Pemerintah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam (secara kolektif disebut SEA-6), menerapkan berbagai mekanisme tata kelola untuk mencapai dua tujuan ini. Mendorong ekonomi digital dan memfasilitasi inovasi untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari teknologi digital sebagai kekuatan horizontal di seluruh sektor industri. Sementara itu, melindungi masyarakat digital dengan menekankan inklusi, integritas, dan keberlanjutan, untuk memastikan bahwa kemajuan digital sejalan dengan prioritas nasional sambil mengurangi risiko serta dampak negatif yang tidak diinginkan.

Di Asia Tenggara, tindakan penyeimbangan ini dapat diamati dalam bidang kebijakan bersama (apa) dari tata kelola AI, keamanan siber dan perlindungan data, serta promosi keamanan dan integritas. Pemerintah di seluruh kawasan Asia Tenggara telah memperkenalkan kebijakan baru atau memperbarui peraturan yang ada untuk mengatasi peluang dan potensi gangguan yang ditimbulkan oleh AI, lanskap ancaman dunia maya yang terus berkembang, serta memperdalam integrasi perdagangan elektronik (e-commerce), fintech, dan platform digital. Strategi ketahanan siber diperbarui untuk melindungi infrastruktur penting, serta memerangi bahaya dan penipuan online, tetap menjadi fokus utama.

Di luar prioritas kebijakan, tindakan penyeimbangan ini juga terlihat pada tingkat struktural (siapa) dan pendekatannya (bagaimana). Pada tingkat struktural, pada tahun 2024 muncul sejumlah lembaga baru yang ditugaskan untuk mengelola ekosistem digital secara holistik, mulai dari mendorong pertumbuhan ekonomi digital hingga melindungi warga di ruang digital dan memajukan infrastruktur publik digital. Badan khusus di bidang kecerdasan buatan (AI), perdagangan elektronik (e-commerce), dan kejahatan siber, didirikan untuk membangun pengetahuan mendalam serta implementasinya. Seperti yang disampaikan dalam laporan TFGI tahun 2023 berjudul *Evolution of Tech Regulation in the Digital Economy*, koordinasi kebijakan teknologi digital menjadi lebih penting daripada sebelumnya, dengan pendekatan menyeluruh oleh pemerintah untuk mendorong upaya lintas sektor dalam mencapai keselarasan kebijakan. Hal ini diperlukan di tingkat nasional dan subnasional dari lembaga pemerintah, di berbagai sektor industri, serta di antara para pemangku kepentingan utama untuk memajukan pengembangan keterampilan dan kapabilitas dalam masyarakat. Selain itu, bagi perusahaan ekonomi digital, kejelasan secara menyeluruh mengenai peningkatan koordinasi kebijakan, akan mempermudah transisi peraturan, terutama seiring dengan pendirian berbagai lembaga baru dan khusus yang berkelanjutan.

**Pemerintah telah memperluas perangkat tata kelola teknologi digital di luar peraturan tradisional, hal ini dikarenakan pemerintah menyadari kebutuhan yang dapat mendorong inovasi dan mempertahankan relevansi.** Selain undang-undang yang bersifat mengikat (hard laws), inovasi kebijakan seperti pedoman lunak (soft guidelines), kerangka kerja (frameworks), dan sandboxes (teknik yang memungkinkan eksekusi program atau file dalam lingkungan terisolasi, yang disebut “sandbox”) juga diterapkan di kawasan tersebut, terutama untuk teknologi yang sedang berkembang. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk memahami berbagai teknologi dan model bisnis serta meningkatkan perhatian terhadap upaya mitigasi dampak negatif yang tidak diinginkan sebelum dilakukan pemasaran produk dan layanan baru. Dengan memanfaatkan inisiatif inovasi kebijakan, regulator dapat memantau kemajuan teknologi secara real-time dan secara bersamaan mendorong kolaborasi antara sektor pemerintah dan swasta untuk melindungi kepentingan publik.

**Pandangan regional mengenai perkembangan tata kelola teknologi di seluruh SEA-6 mengungkapkan bahwa, meskipun berbagai negara memiliki prioritas kebijakan yang sama, sering kali terdapat beberapa perbedaan dalam hal struktur dan pendekatan.** Strategi regulasi sangatlah bervariasi di setiap pasar, di mana hal ini dipengaruhi oleh tradisi hukum, kerangka kerja tata kelola, dan norma budaya masing-masing negara. Dalam konteks tata kelola AI, misalnya, beberapa negara seperti Indonesia memilih regulasi yang mengikat secara hukum untuk menekankan pengawasan dan akuntabilitas. Sementara itu, negara lain lebih memilih pendekatan berbasis prinsip yang fleksibel untuk mendorong inovasi sambil tetap mengelola risiko yang mungkin timbul. Terlepas dari berbagai perbedaan ini, keselarasan yang luas pada prioritas utama seperti tata kelola AI, keamanan siber dan perlindungan data, serta keamanan dan kepercayaan online menghadirkan peluang berharga untuk kerja sama regional.

**Pada tingkat regional, ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dijadwalkan akan rampung pada tahun 2025.** DEFA sendiri bertujuan untuk mengharmonisasi aturan perdagangan digital, memfasilitasi aliran data lintas batas, dan membangun kerangka kerja tata kelola untuk teknologi yang sedang berkembang. Namun demikian, agar pengharmonisasian regional dapat lebih mudah dicapai, mekanisme tata kelola domestik harus terlebih dahulu didefinisikan secara jelas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya pemerintah dapat terlibat dalam ruang diskusi mengenai interoperabilitas yang dapat diimplementasikan.

**Mengingat beragamnya tingkat pembangunan, hukum, dan prioritas nasional di Asia Tenggara, berbagi hasil dan fokus pada prioritas merupakan titik awal untuk menjembatani perbedaan dalam pendekatan tata kelola serta implementasi kebijakan.** Hal ini dapat membantu pemerintah untuk belajar dari negara lain dan membuat aturan antarnegara menjadi lebih sejalan. Meskipun ASEAN DEFA menyediakan kerangka kerja yang luas untuk kolaborasi, prioritas bersama yang diidentifikasi dalam laporan ini, seperti tata kelola AI, keamanan siber dan perlindungan data, serta promosi keamanan dan integritas, menawarkan area nyata untuk berkolaborasi secara langsung. Dengan memprioritaskan kepentingan bersama ini, kemajuan dapat dicapai secara bertahap, membangun kepercayaan, dan kesamaan langkah sebelum masuk kepada hal-hal yang lebih rumit. Pada akhirnya, komitmen kolektif terhadap ekonomi digital regional yang terbuka, terhubung, dan dapat dioperasikan bersama, sangatlah penting untuk menjaga pertumbuhan dan ketahanan digital di Asia Tenggara.

